



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN KECUBUNG I NO. 4 TELP. (0361) 228713 DENPASAR

LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

penyusunan laporan pengelolaan risiko dilaksanakan untuk meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Daerah kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan sesuai visi pembangunan daerah yaitu Denpasar kota berbudaya dilandasi Tri Hita Karana; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam mengelola risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

D. Ruang Lingkup

Kegiatan pelaksanaan pengelolaan risiko ini dilakukan terhadap penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian, rancangan informasi dan komunikasi serta rancangan pemantauan yang dilaksanakan tahun 2024.

BAB II

Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

1) Penetapan konteks strategis Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada:

1. Misi ke 2 (dua) .yaitu Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.

Pada Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan 1 (satu) terkait dengan penetapan konteks/tujuan yaitu; Tujuan strategis yaitu Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Di Kota Denpasar Sasaran: sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas layanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Di Kota Denpasar .IKU Strategis, yaitu Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **lampiran 1 (form 2.b.1 MR OPD)**

2) Penetapan konteks operasional Dinas/Badan mengacu pada:

- a. Program : Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, Keindahan).yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2 (Form 2.c.1 MR OPD)**

B. Hasil Identifikasi Risiko

Hasil Identifikasi Risiko Strategis dan operasional Satuan Polisi Pamong Praja memuat uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko) dapat disajikan dalam **lampiran 3 (form 3.b dan 3.c MR OPD 2024)**

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 10 .risiko dari populasi. Dari data tersebut diatas juga dapat diidentifikasi jumlah risiko yang dapat dikendalikan (*controllable*) sebanyak 10 .buah dari total risiko strategis pemda dan jumlah risiko yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) sebanyak 0 .buah dari total risiko strategis pemda.

C. Hasil Analisis Risiko

Dari 10 (sepuluh) (**jumlah di form 4**) risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagain dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 0 (nol) risiko (100% dari 10 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada **Lampiran 5 (form 5 MR OPD 2024)**.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Seluruh risiko prioritas telah memiliki *existing control* (sebanyak 10 (sepuluh) risiko atau 100 % dari jumlah/populasi risiko prioritas) dapat dilihat pada **Lampiran 7 (Form 7 MR OPD 2024)**

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Sebanyak 10 (sepuluh) risiko prioritas telah memiliki *existing control* namun belum memadai sebanyak 0 (nol) risiko atau 0% dari jumlah/populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada **Lampiran 7 (form 7 MR OPD 2024)**.

BAB III

Rancangan Informasi dan Komunikasi

Sebanyak 10 (sepuluh) risiko strategis telah menyajikan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dari total 10 (sepuluh) risiko prioritas yang telah diidentifikasi dan memerlukan rancangan informasi dan komunikasi agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan dapat dilihat pada **lampiran 8 (Form 8 MR OPD 2024)**

BAB IV

Rancangan Pemantauan

Dari 10 (sepuluh) kegiatan pengendalian yang dibutuhkan telah dirancang mekanisme pemantauan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif, dapat disajikan dalam **lampiran 9 (Form 9 MR OPD 2024)**

BAB V

Penutup

Laporan Pengelolaan risiko Satpol PP Kota Denpasar tahun 2024 ini memuat hasil identifikasi resiko kegiatan, dampak resiko, analisis resiko, serta status resiko yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilaksanakan. Laporan yang disusun dan dilaksanakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Denpasar berdasarkan Renstra 2021-2026.

Denpasar, 5 Januari 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar



Agus Agung Nugrah Bawa Nendra, SH., M.Si

Nip. 196704181997031002

Lampiran (Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

lampiran 1 (form 2.b.1 MR OPD)

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar		
Tahun Penilaian	: 2024		
Periode yang dinilai	:		
Urusan Pemerintahan	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
OPD yang Dinilai	: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar		
Sumber Data	Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar		
Tujuan Strategis	Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar		
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas layanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan	85,78%
Program			
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis:Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar		
	Sasaran Strategis:Meningkatnya Kualitas layanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar		
	IKU Strategis:Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan		
	Program : Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		

Lampiran 2 (Form 2.c.1 MR OPD)

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Kota Denpasar		
Tahun Penilaian	: 2024		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: URUSAN Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
OPD yang Dinilai	: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar		
Sumber Data	: Renja Satpol PP 2024		
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Di Kota Denpasar		
Program Satpol PP (Renja tahun 2022) dan Kegiatan Utama	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum / Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	89.84%
	2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, Keindahan)	89,43%
	3	Rasio Satlinmas	3,21
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, Keindahan).</p>		

Lampiran 3 (form 3.a, 3.b dan 3.c MR OPD 2024)

Form 3.C

**FORMULIR KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Nama OPD	: Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Penilaian	: 2024
Periode yang dinilai	: 2024
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat Di Kota Denpasar
Sasaran strategis OPD	: Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat Di Kota Denpasar Meningkat
Urusan Pemerintahan	: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Risiko			Sektor			C/B/C	Dampak	
			Tingkat	Waktu	Ende Risiko	Waktu	Sumber	Waktu		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Program PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
1	Kegiatan: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Perrentare Penyelenggaraan Pelaksanaan Perda	pelaksanaan	Perrentare Penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perwali yang diterbitkan tidak sesuai target	R00.24.05.10.01	Satpal PP	Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perwali di Kota Denpasar .	Internal dan Eksternal	C	Terdapat pelanggaran perda/perwali yang masih belum tertangani secara optimal	Satpal PP
2	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(ratu) Daerah Kabupaten/Kota	Perrentare Penyelenggaraan Pelaksanaan K3 (ketertiban keamanan keindahan)	pelaksanaan	Perrentare Penyelenggaraan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang diterbitkan tidak sesuai target	R00.24.05.10.02	Satpal PP	pelanggaran tramtibum tidak beresikap kooperatif/reat diterbitkan	Internal dan Eksternal	C	Tidak tercapainya target penyelesaian pelanggaran tramtibum di Kota Denpasar	Satpal PP
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perrentare Penuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pelaksanaan	terkendalanya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	R00.24.05.10.03	Satpal PP	Sistem / jaringan error pada saat pembuatan / pengajuan gaji	Internal	C	terlambatnya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Satpal PP
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perrentare Penuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	pelaksanaan	terkendalanya Penuhan kebutuhan Peralatan Kantor, Bahan Baku dan Lartalari penerangan Kantor	R00.24.05.10.04	Satpal PP	harga barang yang tidak stabil serta keterlambatan penyedia dalam mengirim barang kebutuhan kantor	Internal dan Eksternal	C	Operasional kantor terganggu	Satpal PP
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perrentare Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pelaksanaan	terkendalanya pembayaran honor peqawai kontrak	R00.24.05.10.05	Satpal PP	Sistem / jaringan error pada saat pembuatan / pengajuan honor peqawai kontrak	Internal dan Eksternal	C	terlambatnya pembayaran honor peqawai kontrak	Satpal PP
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perrentare Barang Milik daerah yang layak pakai	pelaksanaan	terkendalanya pemeliharaan kendaraan operasional kantor dan pemeliharaan gedung kantor	R00.24.05.10.06	Satpal PP	penanggung jawab kendaraan / aret kantor tidak secara rutin mengecek sarana / prasarana nya	Internal	C	terganggunya kegiatan rutin satpal ppyang memerlukan sarana / prasarana kantor	Satpal PP
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perrentare pemuhan kebutuhan Barang milik Daerah	pelaksanaan	Terkendalanya Pengadaan barang milik daerah	R00.24.05.10.07	Satpal PP	kendala mencari produk ber TKDN	Internal dan Eksternal	C	terkendalanya upaya pemajuan sarana prasarana satpal PP	Satpal PP
6	Administrasi Kepequeasaan Perangkat Daerah	Perrentare layanan kepequeasaan perangkat daerah	pelaksanaan	Terkendalanya pengadaan pakaian dinas	R00.24.05.10.08	Satpal PP	kendala pengadaan tidak tepat waktu	Internal dan Eksternal	C	terlambatnya penyediaan pakaian dinas	Satpal PP

Lampiran 4. (form 4)

Nama Pemda	: PEMERINTAH KOTA DENPASAR				
Tahun Penilaian	: 2024				
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat Di Kota Denpasar				
Urusan Pemerintahan	: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemda				0
1	Belum Optimalnya Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perwali;	RSP.24.05.10.01	2	2	4
II	Risiko Strategis OPD				
	Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja				
1	Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Denpasar.	RSP.24.05.10.01	2	2	4
2	belum optimalnya penegakan perda /perwali di Kota Denpasar karena belum adanya sistem terintegrasi dengan SKPD terkait yang dapat mempercepat efektivitas dan efisiensi penegakan perda	RSP.24.05.10.01	2	2	4

					0
III	Risiko Operasional OPD				
	Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja				
1	Persentase Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwali yang ditertibkan tidak sesuai target	ROO.24.05.10.01	2	2	4
2	Persentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditertibkan tidak sesuai target	ROO.24.05.10.02	2	2	4
3	terkendalanya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	ROO.24.05.10.03	2	2	4
4	terkendalanya Pemenuhan kebutuhan Peralatan Kantor, Bahan Bacaan dan Instalasi penerangan Kantor	ROO.24.05.10.04	2	2	4
5	terkendalanya pembayaran honor pegawai kontrak	ROO.24.05.10.05	2	2	4
6	terkendalanya pemeliharaan kendaraan operasional kantor dan pemeliharaan gedung kantor	ROO.24.05.10.06	2	2	4
7	Terkendalanya Pengadaan barang milik daerah	ROO.24.05.10.07	2	2	4
8	Terkendalanya pengadaan pakaian dinas	ROO.24.05.10.08	2	2	4

Lampiran 5 (form 5).

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian	: 2024					
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat Di Kota Denpasar					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemda					
	Belum Optimalnya Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perwali;	RSP.24.05.10.01	2	Kepala OPD	perilaku tidak kooperatif dari pelanggar perda saat ditertibkan, dan kurangnya wawasan personil / aparat dalam proses penegakkan perda	adanya pelanggaran perda/perwali yang masih belum tertangani
II	Risiko Strategis OPD					
	Nama OPD : Satpol PP					

1	Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Denpasar.	RSO.23.05.10.01	2	Kepala OPD	Belum Optimalnya Peningkatan peranan Satpol PP Kota Denpasar dalam deteksi dan cegah dini terhadap pelanggaran perda dan perwali	Masih terdapatnya pelanggaran perda dan gangguan tramtibum yang terjadi di Kota Denpasar yang tidak terdeteksi sejak awal
2	belum optimalnya penegakan perda /perwali di Kota Denpasar karena belum adanya sistem terintegrasi dengan SKPD terkait yang dapat mempercepat efektivitas dan efisiensi penegakan perda	RSO.23.05.10.02	2	Kepala OPD	Kurang Koordinasi dengan Instansi terkait dalam penegakan perda	Terdapat pelanggaran perda/perwali yang masih belum tertangani secara optimal
III	Risiko Operasional OPD					
	Nama OPD: Satpol PP					
1	Persentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditertibkan tidak sesuai target	ROO.24.05.10.01	2	Kepala Bidang	Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perwali di Kota Denpasar .	Terdapat pelanggaran perda/perwali yang masih belum tertangani secara optimal
2	Persentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditertibkan tidak sesuai target	ROO.24.05.10.02	2	Kepala Bidang	pelanggar tramtibum tidak bersikap kooperatif saat ditertibkan	Tidak tercapainya target penyelesaian pelanggaran tramtibum di Kota Denpasar
3	terkendalanya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	ROO.24.05.10.03	2	Sekretaris	Sistem / jaringan error pada saat pembuatan / pengajuan gaji	terlambatnya pembayran gaji dan tunjangan ASN

4	terkendalanya Pemenuhan kebutuhan Peralatan Kantor, Bahan Bacaan dan Instalasi penerangan Kantor	ROO.24.05.10.04	2	Sekretaris	harga barang yang tidak stabil serta keterlambatan penyedia dalam mengirim barang kebutuhan kantor	Operasional kantor terganggu
5	terkendalanya pembayaran honor pegawai kontrak	ROO.24.05.10.05	2	Sekretaris	Sistem / jaringan error pada saat pembuatan / pengajuan honor pegawai kontrak	terlambatnya pembayaran honor pegawai kontrak
6	terkendalanya pemeliharaan kendaraan operasional kantor dan pemeliharaan gedung kantor	ROO.24.05.10.06	2	Sekretaris	penanggung jawab kendaraan / aset kantor tidak secara rutin mengecek sarana / prasarananya	terganggunya kegiatan rutin satpol ppyang memerlukan sarana / prasarana kantor
7	Terkendalanya Pengadaan barang milik daerah	ROO.24.05.10.07	2	PPK	kendala mencari produk ber TKDN	terkendalanya upaya peremajaan sarana prasarana satpol PP
8	Terkendalanya pengadaan pakaian dinas	ROO.24.05.10.08	2	PPK	kendala pengadaan tidak tepat waktu	terlambatnya penyediaan pakaian dinas

Lampiran 7 (form 7).

**Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

Nama Pemda : PEMERINTAH KOTA DENPASAR Tahun Penilaian : 2024 Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat Di Kota Denpasar Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
	Belum Optimalnya Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perwali;		SOP Penertiban Satpol PP	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan			
II	Risiko Strategis OPD						
	Nama OPD: Satpol PP						

1	Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Denpasar.	RSO.23.05.10.01	SOP Penertiban Satpol PP	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan	Meningkatkan pengetahuan Aparat mengenai Deteksi dan Cegah Dini dalam upaya penanganan pelanggaran perda	Kepala OPD	tw III 2024
2	belum optimalnya penegakan perda /perwali di Kota Denpasar karena belum adanya sistem terintegrasi dengan SKPD terkait yang dapat mempercepat efektivitas dan efisiensi penegakan perda	RSO.23.05.10.02	SOP Penertiban Satpol PP	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan	Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan instansi terkait	Kepala OPD	tw III 2024
III	Risiko Operasional						
	Nama OPD : Satpol PP						
1	Persentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditertibkan tidak sesuai target	ROO.23.05.10.01	SOP Penertiban Satpol PP	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan	Mengedepankan upaya persuasif dalam Penegakkan perda dan meningkatkan Kompetensi personil/aparat	Kepala Bidang	1 Tahun Anggaran

2	Persentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditertibkan tidak sesuai target	ROO.23.05.10.02	SOP Penertiban Satpol PP	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan	Melakukan pendataan lebih awal di wilayah yang banyak terdapat potensi gangguan tramtibum, serta lebih intensif melakukan penertiban secara berkala dengan membuat aplikasi pengaduan	Kepala Bidang	1 Tahun Anggaran
3	terkendalanya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	ROO.23.05.10.03	SOP Pembayaran Gaji	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan	melakukan pemeliharaan jaringan agar pembayaran gaji tetap lancar	sekretaris	1 Tahun Anggaran
4	terkendalanya Pemenuhan kebutuhan Peralatan Kantor, Bahan Bacaan dan Instalasi penerangan Kantor	ROO.23.05.10.04	SOP pengajuan SPJ	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan	berkoordinasi dengan penyedia terkait harga barang dan pengiriman barang	sekretaris	1 Tahun Anggaran

5	terkendalanya pembayaran honor pegawai kontrak	ROO.23.05.10.05	SOP Pembayaran Gaji	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan	melakukan pemeliharaan jaringan agar pembayaran gaji tetap lancar	sekretaris	1 Tahun Anggaran
6	terkendalanya pemeliharaan kendaraan operasional kantor dan pemeliharaan gedung kantor	ROO.23.05.10.06	SOP Pemeliharaan aset	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan	melakukan pengecekan rutin kondisi aset dan kendaraan	sekretaris	1 Tahun Anggaran
7	Terhambatnya proses pemilihan penyedia	ROO.23.05.10.06	1. Perwali No 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi 2. Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan	Pemanfaatan SIKAP LKPP dalam pemilihan penyedia barang/jasa dan Pengadaan barang/jasa melalui SPSE	sekretaris	1 Tahun Anggaran

8	kendala mencari produk ber TKDN	ROO.23.05.10.06	1. Perwali No 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi 2. Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan	Pemanfaatan SIKAP LKPP dalam pemilihan penyedia barang/jasa dan Pengadaan barang/jasa melalui SPSE	sekretaris	1 Tahun Anggaran

Lampiran 8. (form 8)

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN							
Nama Pemda		: PEMERINTAH KOTA DENPASAR					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat Di Kota Denpasar					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
1	Belum Optimalnya Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perwali;	Sosialisasi Perda kepada aparat / masyarakat	Bagian Hukum	Aparat Satpol PP / Masyarakat	TW IV 2024		
II	Risiko Strategis OPD						
	Nama OPD: Satpol PP						
1	Meningkatkan pengetahuan Aparat mengenai Deteksi dan Cegah Dini dalam upaya penanganan pelanggaran perda	Sosialisasi Perda kepada aparat	Bagian Hukum	Aparat Satpol PP	TW IV 2024		

2	Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan instansi terkait	Rapat / koordinasi	Bagian Hukum/Kejaksanaan/Pengadilan/TNI / Polri / OPD terkait lainnya	Bagian Hukum/Kejaksanaan/Pengadilan/ TNI / Polri	TW III 2024		
III Risiko Operasional							
Nama OPD: Satpol PP							
1	Mengedepankan upaya persuasif dalam Penegakkan perda dan meningkatkan Kompetensi personil/aparat	Penertiban / Sosialisasi Perda kepada masyarakat	Bagian Hukum/OPD terkait lainnya	Aparat Satpol PP / Masyarakat	1 Tahun Anggaran		
2	Melakukan pendataan lebih awal di wilayah yang banyak terdapat potensi gangguan tramtibum, serta lebih intensif melakukan penertiban secara berkala dengan membuat aplikasi pengaduan	Penertiban / Sosialisasi Perda	Bagian Hukum	Aparat Satpol PP / Masyarakat	1 Tahun Anggaran		
3	melakukan pemeliharaan jaringan agar pembayaran gaji tetap lancar	Laporan	Kasubag umum	Satpol PP	1 Tahun Anggaran		
4	berkoordinasi dengan penyedia terkait harga barang dan pengiriman barang	Laporan	Kasubag umum	Satpol PP	1 Tahun Anggaran		
5	melakukan pemeliharaan jaringan agar pembayaran gaji tetap lancar	Laporan	Kasubag umum	Satpol PP	1 Tahun Anggaran		

6	melakukan pengecekan rutin kondisi aset dan kendaraan	Laporan	Kasubag umum	Satpol PP	1 Tahun Anggaran		
7	Pemanfaatan SIKAP LKPP dalam pemilihan penyedia barang/jasa dan Pengadaan barang/jasa melalui SPSE	Laporan	Kasubag umum	Satpol PP	1 Tahun Anggaran		
8	Pemanfaatan SIKAP LKPP dalam pemilihan penyedia barang/jasa dan Pengadaan barang/jasa melalui SPSE	Laporan	Kasubag umum	Satpol PP	1 Tahun Anggaran		

Lampiran 9 (form 9).

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN						
Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian	: 2024					
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat Di Kota Denpasar					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Meningkatkan pengetahuan Aparat mengenai Deteksi dan Cegah Dini dalam upaya penanganan pelanggaran perda	Sosialisasi Perda kepada aparat	Kepala OPD	TW III Tahun 2024		
2	Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan instansi terkait	Rapat / koordinasi	Kepala OPD	TW IV Tahun 2024		
3	Mengedepankan upaya persuasif dalam Penegakkan perda dan meningkatkan Kompetensi personil/aparat	Penertiban / Sosialisasi Perda kepada masyarakat	Kepala Bidang	1 Tahun Anggaran		

4	Melakukan pendataan lebih awal di wilayah yang banyak terdapat potensi gangguan tramtibum, serta lebih intensif melakukan penertiban secara berkala	Penertiban / Sosialisasi Perda	Kepala Bidang	1 Tahun Anggaran		
5	melakukan pemeliharaan jaringan agar pembayaran gaji tetap lancar	pemeliharaan secara berkala	Sekretaris	1 Tahun Anggaran		
6	berkoordinasi dengan penyedia terkait harga barang dan pengiriman barang	Koordinasi secara berkala	Sekretaris	1 Tahun Anggaran		
7	melakukan pemeliharaan jaringan agar pembayaran gaji tetap lancar	pemeliharaan secara berkala	Sekretaris	1 Tahun Anggaran		
8	melakukan pengecekan rutin kondisi aset dan kendaraan	pemeliharaan secara berkala	Sekretaris	1 Tahun Anggaran		

terkendalanya Pemenuhan kebutuhan Peralatan Kantor, Bahan Bacaan dan Instalasi penerangan Kantor	ROO.24.05.10.04	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
terkendalanya pembayaran honor pegawai kontrak	ROO.24.05.10.05	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
terkendalanya pemeliharaan kendaraan operasional kantor dan pemeliharaan gedung kantor	ROO.24.05.10.06	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Terkendalanya Pengadaan barang milik daerah	ROO.24.05.10.07	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Terkendalanya pengadaan pakaian dinas	ROO.24.05.10.08	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Denpasar, 5 Januari 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar



Anek Agung Nugrah Bawa Nendra, SH., M.Si
Nip. 196704181997031002